

Tata Kelola AI dan Akuntabilitas Algoritmik dalam Administrasi Publik: Analisis Bibliometrik

Anna Asriniati Harahap¹, Asiah Wasillah²

Program Studi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia²

✉ Email Korespondensi: annaasriniati99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima	17-09-2026
Disetujui	12-10-2026
Diterbitkan	30-10-2026

ABSTRACT

This study maps publication growth, thematic structure, temporal patterns, and collaboration in research on AI governance and algorithmic accountability in public administration. It analyzes 6,088 publications retrieved from Dimensions for 2017-2026 using a structured Boolean query; the bibliographic metadata were exported on 15 September 2026. VOSviewer was used to examine annual publication counts, text-term co-occurrence from titles and abstracts, overlay patterns, and co-authorship among authors, organizations, and countries. For the text map, a threshold of 30 occurrences yielded 483 terms, from which 290 were selected using the 60% most-relevant-terms option and binary counting. The dataset shows the highest publication counts in 2025 and 2026, with 2026 representing a partial year. The text-term map links public administration and the public sector with algorithmic accountability, human oversight, regulation, auditing, privacy, ethics, algorithmic bias, and public trust. The findings portray a multidimensional field connecting technological, legal, institutional, ethical, and societal concerns, while identifying themes that warrant further substantive and empirical study.

Keywords: AI Governance; Algorithmic Accountability; Bibliometric Analysis; Human Oversight; Public Sector; Public Administration

ABSTRAK

Penelitian ini memetakan perkembangan publikasi, struktur tema, pola temporal, dan kolaborasi dalam kajian tata kelola AI dan akuntabilitas algoritmik di administrasi publik. Analisis mencakup 6.088 publikasi dari Dimensions periode 2017-2026 yang diidentifikasi melalui Boolean query terstruktur, metadata bibliografis diekspor pada 15 September 2026. VOSviewer digunakan untuk menganalisis jumlah publikasi tahunan, co-occurrence istilah dari teks judul dan abstrak, pola overlay, serta co-authorship penulis, organisasi, dan negara. Pada peta teks, ambang 30 kemunculan menghasilkan 483 istilah, 290 istilah dipilih melalui opsi 60% istilah paling relevan dengan binary counting. Jumlah publikasi tertinggi dalam dataset tercatat pada 2025 dan 2026, dengan 2026 sebagai tahun parsial. Peta istilah menghubungkan administrasi publik dan sektor publik dengan akuntabilitas algoritmik, pengawasan manusia, regulasi, audit, privasi, etika, bias algoritmik, dan kepercayaan publik. Temuan menunjukkan bidang multidimensi yang menghubungkan aspek teknologi, hukum, kelembagaan, etika, dan masyarakat serta mengidentifikasi tema yang perlu diteliti lebih lanjut.

Kata Kunci: Tata Kelola AI; Akuntabilitas Algoritmik; Analisis Bibliometrik; Pengawasan Manusia; Sektor Publik; Administrasi Publik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Asriniati Harahap, A., & Wasillah, A. (2026). Tata Kelola AI dan Akuntabilitas Algoritmik dalam Administrasi Publik: Analisis Bibliometrik. LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren, 4(2), 1156-1173. [https:// doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8752](https://doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8752)

PENDAHULUAN

Perkembangan *artificial intelligence* (AI) telah mengubah cara pemerintah merumuskan kebijakan, menyediakan layanan publik, mengelola data, dan mendukung pengambilan keputusan. Dalam administrasi publik, perkembangan tersebut mendorong pergeseran dari digitalisasi prosedural menuju tata kelola yang semakin bergantung pada sistem algoritmik. *AI governance* kemudian berkembang sebagai kerangka yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup prinsip, kebijakan, mekanisme kelembagaan, norma etika, dan pengaturan teknis yang mengarahkan perumusan, pengembangan, implementasi, evaluasi, serta pertanggungjawaban sistem AI di sektor publik (Baruch & Sánchez, 2021; Bravo, 2020; Merino, 2023; OECD/CAF, 2024; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023). Perkembangan tersebut ditandai oleh munculnya *gubernanza pública algorítmica* yang menempatkan algoritma sebagai bagian dari proses tata kelola publik sekaligus memunculkan persoalan mengenai prediktabilitas, transparansi, perlindungan hak fundamental, dan akuntabilitas (Baruch & Sánchez, 2021; García, 2024). Oleh sebab itu, prinsip hak asasi manusia, martabat, non diskriminasi, transparansi, *explainability*, akuntabilitas, dan pengawasan manusia menjadi elemen penting dalam desain serta implementasi AI publik (Anguita et al., 2023; Bravo, 2020; MÁVIL, 2023; Vallé, 2021).

Perkembangan AI dalam administrasi publik juga perlu dipahami sebagai bagian dari transformasi digital yang melibatkan teknologi, organisasi, manusia, data, regulasi, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi teknologi digital dalam pemerintahan berkaitan dengan efektivitas pelayanan, kesiapan operasional, kapasitas aparatur, serta kemampuan organisasi mengelola sistem digital. (Harahap & Nursyafniati, 2026), misalnya, menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dalam pelayanan publik membutuhkan dukungan kualitas data, sumber daya manusia, dan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Permasalahan akurasi data dan keterbatasan kapasitas aparatur dapat memengaruhi kualitas serta efektivitas pelayanan digital.

Penelitian (Harahap, 2022) juga memperlihatkan bahwa sistem pengaduan digital seperti SP4N-LAPOR merupakan instrumen transparansi dan partisipasi publik, tetapi efektivitasnya dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat beradaptasi dengan sistem digital serta ketersediaan akses teknologi. Sementara itu, kajian mengenai transformasi sumber daya manusia protokol pemerintahan menunjukkan bahwa komunikasi digital dan AI semakin terkait dengan perubahan kapasitas aparatur dalam lingkungan pemerintahan. Konteks tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan teknologi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis sistem, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan manusia yang mengoperasikannya.

Tata kelola AI juga membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, academia, dan organisasi masyarakat sipil karena pengembangan dan penggunaan AI publik tidak berlangsung hanya dalam batas organisasi pemerintah (Bravo, 2020; MÁVIL, 2023; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023; Vallé, 2021). Selain itu, kualitas *AI governance* sangat berkaitan dengan tata kelola data karena ketersediaan, kualitas, integrasi, interoperabilitas, keamanan, dan akses terhadap data menjadi fondasi penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik (Gil, 2024; Gutiérrez, 2023; Sáez & Jiménez, 2021; Salvador, 2021; Sicos et al., 2024). Literatur menunjukkan bahwa *AI governance* berkembang pada berbagai tingkatan, mulai dari *hard law* dan *soft law*, kerangka etika, standar teknis, hingga mekanisme organisasi dan operasional (Alegría, 2023; Bravo, 2020; Coromina, 2024; Fernández, 2022).

Pendekatan multilevel governance kemudian menghubungkan norma internasional, instrumen regional, strategi nasional, dan kebijakan lokal dalam mengarahkan penggunaan AI secara bertanggung

jawab di sektor publik (Alegría, 2023; Anguita et al., 2023; OECD/CAF, 2024; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023). Variasi kapasitas data, sumber daya manusia, infrastruktur, dan institusi antar wilayah menunjukkan bahwa perkembangan *AI governance* tidak berlangsung secara seragam (Benítez & Ruvalcaba-Gómez, 2021; Cevallos-Torres & Vegas-Meléndez, 2022; Clément, 2022; Díaz & Ospina, 2023; Quintero-Cuero, 2023).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika AI digunakan untuk menghasilkan atau mendukung keputusan administratif. Dalam konteks ini, *algorithmic accountability* diperlukan sebagai mekanisme yang memungkinkan proses, keputusan, dan dampak sistem algoritmik dapat dijelaskan, diperiksa, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. (Busuioc, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan AI di sektor publik menghadirkan tantangan akuntabilitas yang berkaitan dengan transparansi, interpretabilitas, dan kemampuan publik untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan berbasis algoritma. Akuntabilitas tidak cukup dibangun melalui keterbukaan informasi, tetapi membutuhkan kombinasi *explainability*, audit, dokumentasi, pengawasan manusia, dan mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan (Dubey et al., 2024; Mora-Cantalops et al., 2024; Quinn et al., 2024; Schoenherr et al., 2023). *Algorithmic transparency* memungkinkan pihak yang berkepentingan memahami bagaimana data dan sistem berkontribusi terhadap suatu keputusan, sedangkan *algorithmic auditing* menyediakan mekanisme pemeriksaan terhadap bias, diskriminasi, risiko, dan dampak sistem AI (Bell et al., 2022; Cheong, 2024; Fritz-Morgenthal et al., 2022; Ridley, 2022).

Impact assessment juga dipandang sebagai instrumen penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap privasi, hak fundamental, dan kelompok rentan sebelum serta selama sistem AI digunakan (Cernăzanu-Glăvan & Bulzan, 2025; Martínez, 2020; Nannini, 2024; Nannini et al., 2024; Rane et al., 2024). Pada saat yang sama, *human oversight* diperlukan untuk memastikan bahwa otomatisasi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia dalam keputusan berisiko tinggi (Hernandez et al., 2021; Quinn et al., 2024; Schoenherr et al., 2023). Perdebatan mengenai transparansi juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan keterbukaan algoritmik dengan perlindungan kekayaan intelektual, keamanan, dan kerahasiaan data, sehingga transparansi tidak selalu berarti membuka seluruh kode atau arsitektur sistem (Nannini, 2024; Nannini et al., 2024; Quinn et al., 2024). Kerangka *TEFT (Transparency-Explainability-Functionality and Tensions)* menunjukkan perlunya memahami hubungan antara transparansi, *explainability*, fungsi sistem, dan kepentingan lain dalam penerapan AI (Nannini, 2024). Dengan demikian, akuntabilitas algoritmik merupakan persoalan multidimensional yang mencakup aspek teknologi, hukum, kelembagaan, etika, dan partisipasi publik (Cortecci & Bonetti, 2024; Percy et al., 2021).

Hubungan antara *AI governance* dan akuntabilitas algoritmik selanjutnya berkaitan dengan transparansi, kepercayaan publik, pengawasan, dan proses pengambilan keputusan administrasi publik. Transparansi mengenai penggunaan AI, pemrosesan data, dan proses pengambilan keputusan dapat berhubungan dengan kepercayaan publik apabila disertai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas (Casula & Steinebach, 2025; Ulnicane & Erkkilä, 2023).

Legitimasi penggunaan AI juga dipengaruhi oleh partisipasi pemangku kepentingan, budaya organisasi, narasi kebijakan, serta hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Bravo, 2020; Rivera-Ulloa & Vegas-Meléndez, 2023). Karena itu, pengawasan formal melalui regulator, audit independen, dan kerangka kepatuhan perlu dipertimbangkan bersama pengawasan informal melalui partisipasi warga dan kontrol publik (Busuioc, 2020; Cheong, 2024; Laux, 2024). Pada tingkat implementasi, audit trails, dokumentasi, audit independen, mekanisme *redress*, dan pembagian tanggung

jawab antara penyedia teknologi, operator, serta pembuat kebijakan menjadi bagian dari infrastruktur akuntabilitas (Busuioc, 2020; Quinn et al., 2024; Urquhart et al., 2022).

Meskipun literatur mengenai *AI governance* dan akuntabilitas algoritmik berkembang pesat, bidang penelitian tersebut masih menunjukkan keragaman konseptual dan tematik. Studi studi terdahulu membahas regulasi, transparansi, etika, *data governance*, *human oversight*, audit algoritmik, kepercayaan publik, serta kapasitas institusional, tetapi hubungan antartema dan perkembangan struktur pengetahuannya belum selalu terlihat secara sistematis.

Variasi pendekatan regulasi, kapasitas institusional, infrastruktur data, dan konteks sosial politik antarnegara juga dapat menghasilkan bentuk *governance* dan mekanisme akuntabilitas yang berbeda (Anguita et al., 2023; Díaz & Ospina, 2023; Moreira-Arteaga & Bermeo-Valencia, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya memandang *AI governance* dan *algorithmic accountability* sebagai ekosistem yang mencakup regulasi, data, teknologi, organisasi, pengawasan, dan partisipasi publik, bukan sebagai dua konsep yang berdiri sendiri (Gutiérrez, 2023; Romero, 2020; Sáez & Jiménez, 2021; Salvador, 2021). Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kebutuhan membangun *governance* yang adaptif melalui *sandbox*, eksperimen regulasi, dan pembelajaran kebijakan untuk merespons perubahan teknologi (Ferreira, 2023; Muñoz, 2024).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana perkembangan publikasi penelitian mengenai *AI governance* dan *algorithmic accountability* dalam administrasi publik, (2) apa saja tema, istilah, dan hubungan konseptual utama yang membentuk bidang penelitian tersebut, dan (3) bagaimana arah perkembangan serta kesenjangan penelitian mengenai hubungan *AI governance* dan *algorithmic accountability* dalam administrasi publik? Penelitian ini bertujuan memetakan perkembangan dan struktur pengetahuan bidang tersebut melalui analisis bibliometrik terhadap publikasi yang teridentifikasi dalam database Dimensions.

Pendekatan bibliometrik digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan volume publikasi, pola keterkaitan istilah, struktur konseptual, dinamika temporal, serta area penelitian yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pertumbuhan jumlah publikasi, tetapi juga memberikan pemetaan empiris mengenai bagaimana *AI governance* dan *algorithmic accountability* berkembang dan saling terhubung dalam kajian administrasi publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain bibliometrik deskriptif untuk memetakan perkembangan dan struktur pengetahuan mengenai tata kelola AI dan akuntabilitas algoritmik dalam administrasi publik. Data diperoleh melalui penelusuran di Dimensions menggunakan Boolean query yang dijelaskan berikut ini; metadata bibliografis diekspor pada 15 September 2026. Boolean query yang digunakan adalah ("AI governance" OR "artificial intelligence governance") AND ("algorithmic accountability" OR "algorithmic transparency" OR "algorithmic auditing") AND ("public administration" OR "public sector" OR "government"). Pencarian menghasilkan 6.088 publikasi pada periode 2017-2026. Metadata yang dianalisis mencakup tahun publikasi, penulis, afiliasi/organisasi, negara, dan informasi teks bibliografis.

Analisis dilakukan menggunakan VOSviewer untuk distribusi publikasi tahunan, peta co-occurrence istilah dari teks judul dan abstrak, visualisasi network dan density, overlay visualization, serta co-authorship pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Untuk peta berbasis teks, istilah diekstraksi dari bidang judul

dan abstrak; label abstrak terstruktur dan pernyataan hak cipta diabaikan. Dari 49.169 istilah yang teridentifikasi, ambang minimum 30 kemunculan menghasilkan 483 istilah yang memenuhi ambang. Selanjutnya, 290 istilah dipilih berdasarkan skor relevansi, mengikuti pilihan 60% istilah paling relevan yang disediakan VOSviewer. Peta istilah menggunakan binary counting. Pengaturan ini berarti keberadaan istilah dalam dokumen dihitung secara biner, bukan berdasarkan pengulangan istilah dalam dokumen yang sama. Untuk peta co-authorship, metode penghitungan yang dipilih adalah full counting.

Pada analisis penulis digunakan ambang minimum 3 dokumen dan 0 sitasi, 213 dari 5.873 penulis memenuhi ambang. Dokumen yang melibatkan lebih dari 25 penulis dikecualikan dari analisis ini, dan opsi pengubahan nama depan penulis menjadi inisial tidak diaktifkan. Pada analisis organisasi digunakan ambang minimum 3 dokumen dan 0 sitasi, 316 dari 2.339 organisasi memenuhi ambang. Pada analisis negara digunakan ambang minimum 14 dokumen dan 0 sitasi, 37 dari 112 negara memenuhi ambang.

Untuk analisis organisasi dan negara, dokumen yang melibatkan lebih dari 25 organisasi atau negara dikecualikan sesuai unit analisis. Tahun 2026 diperlakukan sebagai tahun parsial karena data diambil pada 15 September 2026. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang teridentifikasi melalui Boolean query, terbit pada 2017-2026, dan berkaitan dengan tata kelola AI, akuntabilitas/transparansi/audit algoritmik, serta administrasi publik, sektor publik, atau pemerintahan. Rekaman duplikat yang teridentifikasi, rekaman dengan metadata tidak memadai untuk analisis tertentu, dan rekaman yang tidak sesuai dengan irisan topik berdasarkan metadata tidak digunakan pada analisis terkait. Jumlah 6.088 merujuk pada hasil pencarian Dimensions yang menjadi korpus awal, bukan klaim bahwa seluruh rekaman telah lolos penilaian teks lengkap. Interpretasi dibatasi pada pola bibliografis dan hubungan yang terlihat dalam dataset, visualisasi tidak diperlakukan sebagai ukuran langsung kualitas penelitian atau dampak kebijakan.

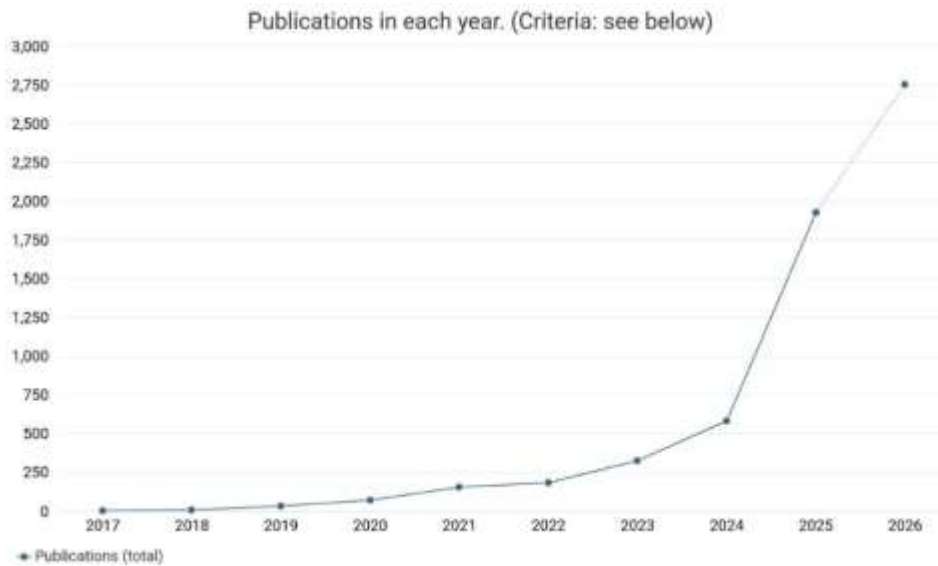
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Bibliometrik

1) Perkembangan Publikasi Berdasarkan Tahun

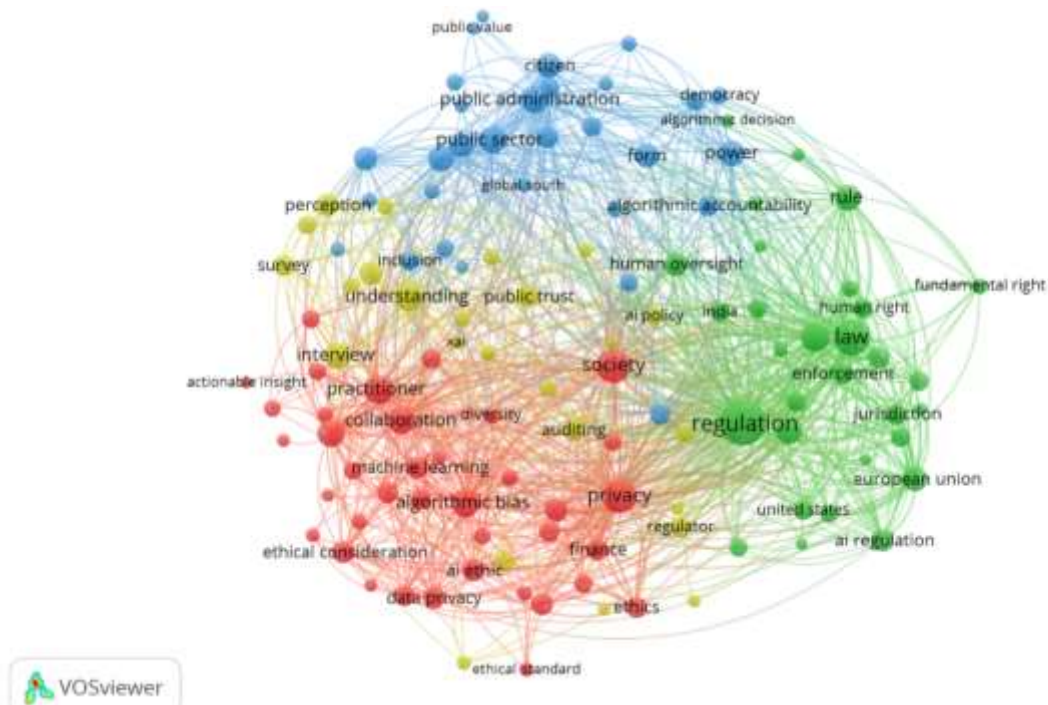
Dataset penelitian terdiri atas 6.088 publikasi yang diperoleh melalui pencarian Dimensions dengan tiga kelompok kriteria, yaitu *AI governance* atau *artificial intelligence governance*; *algorithmic accountability*, *algorithmic transparency*, atau *algorithmic auditing*; serta *public administration*, *public sector*, atau *government*. Distribusi publikasi yang ditampilkan dalam grafik mencakup periode 2017-2026.

Pada 2017 terdapat 3 publikasi, kemudian 7 publikasi pada 2018 dan 29 publikasi pada 2019. Tahun 2020 mencatat 68 publikasi, sedangkan 2021 mencatat 153 publikasi dan 2022 sebanyak 187 publikasi. Pada 2023 terdapat 327 publikasi dan 2024 sebanyak 586 publikasi. Jumlah publikasi meningkat menjadi 1.927 pada 2025 dan 2.801 pada 2026. Seluruh distribusi tersebut berjumlah 6.088 publikasi sesuai dengan jumlah dokumen dalam dataset. Angka 2026 perlu dibaca sesuai cakupan dataset pada saat pengambilan data karena tahun tersebut merupakan tahun berjalan.



Gambar 1. Perkembangan Publikasi
(Sumber: *Diolah Peneliti, 2026*)

2) Jaringan dan Klaster Kata Kunci

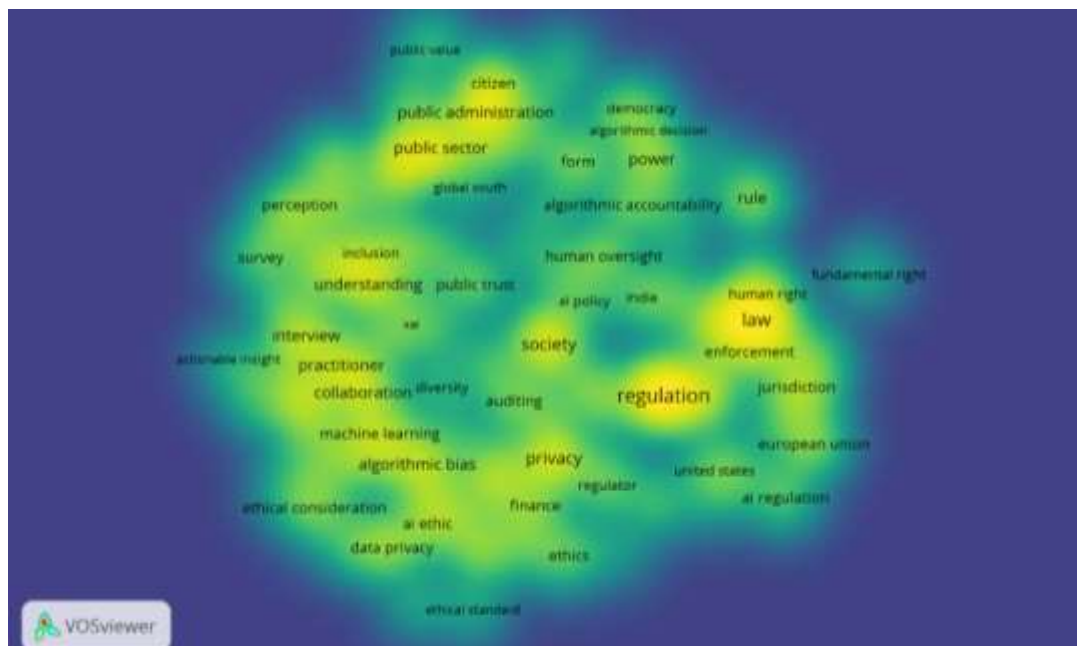


Gambar 2. Network Visualization
(Sumber: *Diolah Peneliti, 2026*)

Peta network visualization memperlihatkan sejumlah istilah yang saling terhubung dalam beberapa kelompok jaringan. Istilah yang terlihat antara lain *public administration*, *public sector*, *citizen*, *public*

value, democracy, algorithmic decision, algorithmic accountability, human oversight, AI policy, law, human right, fundamental right, regulation, enforcement, jurisdiction, European Union, United States, AI regulation, auditing, algorithmic bias, machine learning, privacy, data privacy, AI ethic, ethics, ethical consideration, ethical standard, collaboration, practitioner, interview, survey, perception, understanding, public trust, inclusion, society, dan XAI. Kelompok jaringan bagian atas memuat public administration, public sector, citizen, public value, democracy, dan public trust. Kelompok bagian kanan memuat algorithmic accountability, human oversight, law, regulation, enforcement, jurisdiction, human right, dan fundamental right. Kelompok bagian bawah memuat auditing, algorithmic bias, machine learning, privacy, data privacy, AI ethic, ethics, dan ethical standard. Kelompok bagian kiri memuat perception, survey, understanding, interview, practitioner, collaboration, dan inclusion. Garis penghubung antarkelompok menunjukkan adanya keterkaitan antar istilah dalam dataset. Salah satu hubungan yang terlihat menghubungkan algorithmic accountability dengan public administration, human oversight, regulation, auditing, dan public trust. Dengan demikian, hasil network visualization menunjukkan struktur keterhubungan istilah yang menjadi dasar pembacaan tema penelitian.

3) Visualisasi Kepadatan Kata Kunci

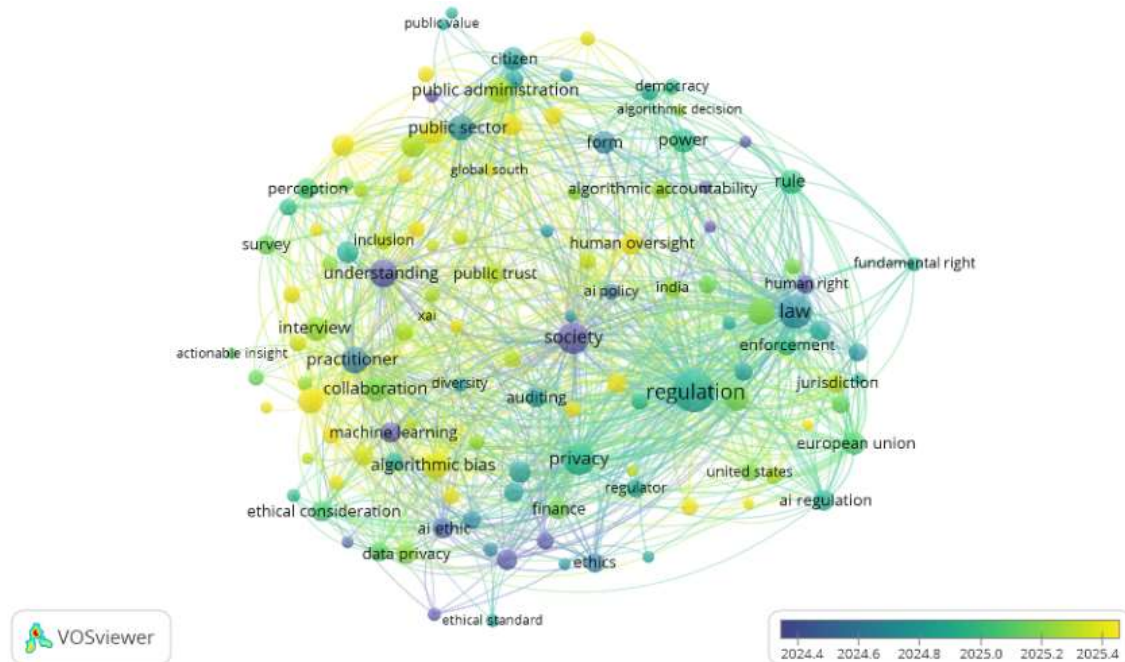


Gambar 3. Density Visualization
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

Visualisasi density memperlihatkan variasi konsentrasi kemunculan istilah dalam dataset. Area dengan intensitas lebih tinggi terlihat di sekitar *public administration*, *public sector*, dan *citizen* pada bagian atas peta. Intensitas yang relatif tinggi juga terlihat pada *algorithmic accountability*, *law*, dan *regulation* di bagian tengah hingga kanan. Pada bagian tengah kiri, konsentrasi terlihat di sekitar *understanding*, *public trust*, *perception*, dan *collaboration*. Bagian bawah kiri menunjukkan konsentrasi di sekitar *machine learning*, *algorithmic bias*, *ethical consideration*, dan *data privacy*. Area tengah bawah juga

memperlihatkan kepadatan di sekitar *auditing*, *privacy*, dan *ethics*. Istilah *human oversight*, *AI policy*, *XAI*, *society*, dan *regulator* berada pada area dengan intensitas yang bervariasi. Sebaliknya, *public value*, *actionable insight*, *global south*, dan *ethical standard* terlihat pada area dengan kepadatan yang relatif lebih rendah. Pola tersebut merupakan distribusi visual konsentrasi kemunculan item dan tidak digunakan sebagai ukuran kualitas atau dampak ilmiah tema.

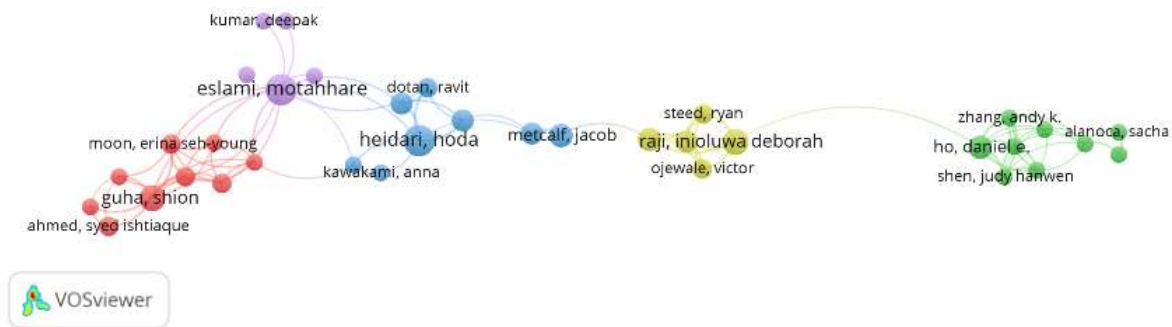
4) Tren Perkembangan Kata Kunci



Gambar 4. Overlay Visualization
(Sumber: Diolah Peneliti, 2026)

Visualisasi overlay menggunakan skala warna tahun dengan rentang sekitar 2024,4 hingga 2025,4. Warna yang lebih mendekati biru menunjukkan nilai tahun yang relatif lebih awal, sedangkan warna yang mendekati kuning menunjukkan nilai tahun yang relatif lebih akhir pada skala visualisasi. Istilah *public administration*, *public sector*, *citizen*, *perception*, *survey*, *inclusion*, *understanding*, dan *public trust* terlihat dengan variasi warna. Istilah *algorithmic accountability*, *human oversight*, *AI policy*, *auditing*, *algorithmic bias*, dan *regulation* juga muncul dalam jaringan dengan variasi warna temporal. Istilah *law*, *human right*, *fundamental right*, *European Union*, *United States*, dan *AI regulation* terlihat pada sisi kanan jaringan, sedangkan *machine learning*, *privacy*, *data privacy*, *AI ethic*, *ethics*, dan *ethical standard* berada pada bagian bawah. Garis antar istilah memperlihatkan hubungan item yang memiliki posisi temporal berbeda dalam peta. Skala legenda mencakup 2024,4; 2024,6; 2024,8; 2025,0; 2025,2; dan 2025,4. Oleh karena itu, overlay digunakan untuk menggambarkan distribusi temporal istilah yang muncul dalam dataset, bukan untuk menyimpulkan perkembangan seluruh periode 2017-2026 secara langsung.

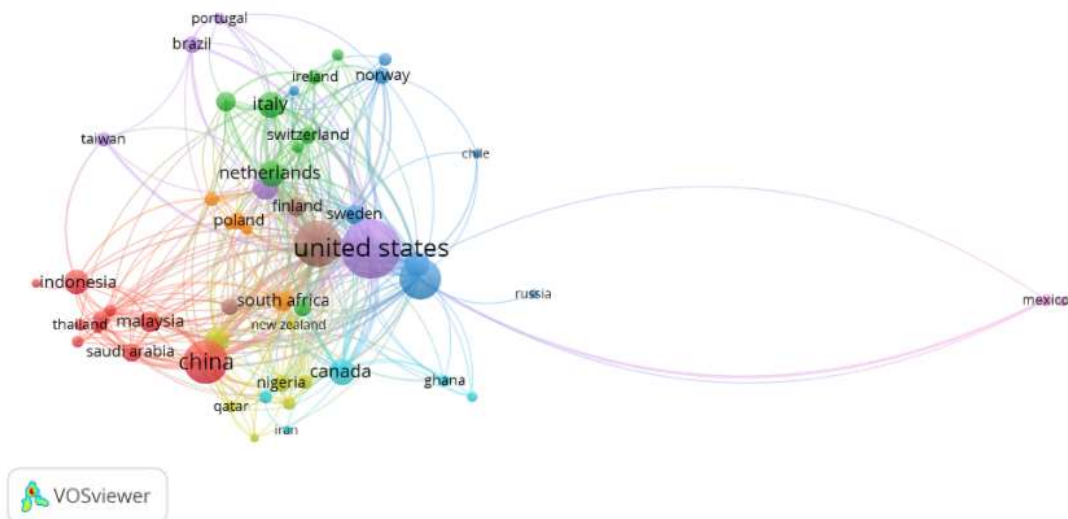
5) Jaringan Co-Authorship Penulis



Gambar 5. Co-authorship author
(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Jaringan co-authorship penulis memperlihatkan beberapa kelompok penulis yang terhubung melalui garis kolaborasi. Nama yang terlihat pada jaringan antara lain Guha, Shion; Ahmed, Syed Ishtiaque; Moon, Erina Seh-Young; Heidari, Hoda; Kawakami, Anna; Eslami, Motahhare; Kumar, Deepak; Dotan, Ravit; Metcalf, Jacob; Raj, Inoluwa; Steed, Ryan; Ojewale, Victor; Zhang, Andy K.; Ho, Daniel E.; Shen, Judy Hanwen; dan Alanoca, Sacha. Kelompok di sisi kiri mencakup Guha, Ahmed, Moon, serta beberapa penulis lain yang berada dalam jaringan warna yang sama. Kelompok bagian tengah memperlihatkan keterhubungan antara Eslami, Kumar, Heidari, Kawakami, Dotan, Metcalf, Raj, Steed, dan Ojewale. Kelompok di sisi kanan memperlihatkan hubungan antara Zhang, Ho, Shen, dan Alanoca. Ukuran node berbeda antara satu penulis dan penulis lainnya. Garis antarnode menunjukkan hubungan ko-authorship yang divisualisasikan oleh VOSviewer. Warna node menunjukkan kelompok jaringan yang berbeda dalam peta co-authorship. Peta tersebut menyajikan struktur hubungan penulis berdasarkan dokumen yang masuk dalam dataset penelitian.

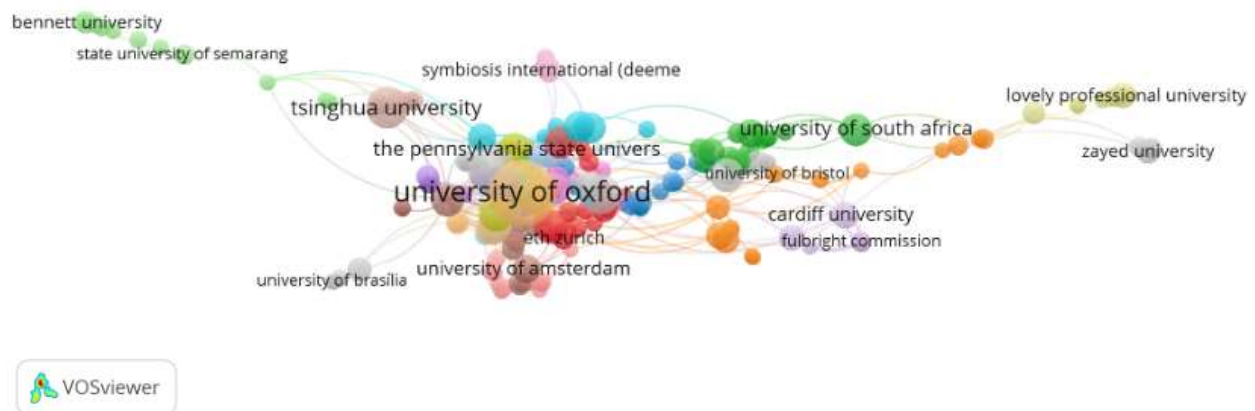
6) Jaringan Co-Authorship Antarnegara



Gambar 6. Co-authorship Countries
(Sumber: Diolah Penulis, 2026)

Peta co-authorship antarnegara memperlihatkan jaringan yang melibatkan sejumlah negara pada dataset penelitian. Negara yang terlihat antara lain United States, China, Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, Norway, Finland, Ireland, Brazil, Portugal, Poland, Canada, South Africa, New Zealand, Indonesia, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, Nigeria, Qatar, Iran, Ghana, Russia, Mexico, Taiwan, dan Chile. United States dan China terlihat sebagai node berukuran besar pada jaringan. Negara-negara Eropa seperti Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland, Norway, Finland, Ireland, Portugal, Poland, dan lainnya berada dalam jaringan yang saling terhubung. Indonesia terlihat terhubung dengan negara-negara lain pada bagian kiri jaringan, sedangkan Mexico berada lebih jauh di sisi kanan dengan garis yang menghubungkannya ke jaringan utama. Canada, South Africa, New Zealand, Nigeria, Ghana, Iran, Qatar, dan Russia juga terlihat sebagai node dalam jaringan. Garis yang menghubungkan negara menunjukkan hubungan co-authorship antarnegara. Warna node membentuk beberapa kelompok jaringan negara. Peta tersebut menggambarkan struktur kolaborasi internasional berdasarkan publikasi dalam dataset 6.088 dokumen.

7) Jaringan Co-Authorship Organisasi



Gambar 7. Co-authorship Organization
(Sumber: *Diolah Penulis*, 2026)

Peta organisasi memperlihatkan sejumlah institusi yang terhubung melalui jaringan co-authorship. Organisasi yang terlihat antara lain University of Oxford, The Pennsylvania State University, Tsinghua University, University of South Africa, University of Bristol, Cardiff University, University of Amsterdam, ETH Zurich, University of Brasília, Fulbright Commission, Symbiosis International, Lovely Professional University, Zayed University, Bennett University, dan State University of Semarang. University of Oxford tampak sebagai node berukuran besar di bagian tengah jaringan. The Pennsylvania State University dan Tsinghua University juga terlihat berada dekat dengan jaringan pusat. University of South Africa, University of Bristol, dan Cardiff University berada pada bagian kanan jaringan. University of Amsterdam dan ETH Zurich berada di sekitar bagian tengah-bawah. Bennett University dan State University of Semarang terlihat pada sisi kiri atas, sedangkan Lovely Professional University dan Zayed University terlihat pada sisi kanan. Garis yang menghubungkan organisasi menunjukkan hubungan co-authorship yang terdapat dalam jaringan publikasi.

PEMBAHASAN

1) Perkembangan Kajian *AI Governance* dan *Algorithmic Accountability*

RQ1: Bagaimana perkembangan publikasi penelitian mengenai *AI governance* dan *algorithmic accountability* dalam administrasi publik? Hasil bibliometrik terhadap 6.088 publikasi menunjukkan peningkatan jumlah publikasi sepanjang 2017-2026, dengan jumlah terbesar tercatat pada 2025 dan 2026. Pola tersebut menunjukkan pertumbuhan volume penelitian yang kuat dalam korpus yang dianalisis. Temuan ini sejalan dengan (Wang et al., 2026), yang membahas semakin luasnya perhatian terhadap AI dalam administrasi publik serta kaitannya dengan perubahan pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan tata kelola.

Pemetaan penelitian ini memperluas gambaran tersebut dengan menunjukkan perkembangan publikasi sekaligus struktur istilah dan jejaring kolaborasi. (Aguilar et al., 2026) juga menempatkan *AI governance* dalam konteks administrasi publik dan *responsible organizational value*. Dengan demikian, RQ1 dijawab melalui bukti kuantitatif mengenai pertumbuhan korpus dan semakin luasnya keterhubungan kajian AI dengan isu-isu administrasi publik. Signifikansinya terletak pada penyediaan gambaran makro mengenai perkembangan bidang, sedangkan kontribusinya terletak pada pemetaan yang menghubungkan pertumbuhan publikasi dengan struktur pengetahuan yang dianalisis pada bagian berikutnya.

2) Struktur Tema dan Fokus Kajian

RQ2: Apa saja tema, istilah, dan hubungan konseptual utama yang membentuk bidang penelitian tersebut? Network visualization memperlihatkan keterhubungan antara *public administration*, *public sector*, *citizen*, *public value*, *public trust*, *algorithmic accountability*, *human oversight*, *law*, *regulation*, *auditing*, *algorithmic bias*, *privacy*, *data privacy*, dan *ethics*. Struktur tersebut menunjukkan bahwa istilah administratif, hukum, etika, teknologi, dan masyarakat muncul secara beririsan dalam jaringan. Temuan ini dapat dibaca bersama (Laux, 2024), yang membahas *human oversight*, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan kepentingan publik dalam tata kelola AI. (Chen et al., 2026) juga menempatkan pertanyaan mengenai aktor yang bertanggung jawab, standar akuntabilitas, dan konsekuensi sebagai bagian penting dari penggunaan AI sektor publik. Dalam dataset penelitian ini, *algorithmic accountability* terhubung dengan *human oversight*, *law*, *regulation*, dan *auditing*, sementara *public trust* dan *citizen* berada dalam jaringan yang sama dengan *public administration* dan *public sector*. Istilah *algorithmic bias*, *privacy*, *data privacy*, dan *ethics* membentuk kelompok yang berkaitan dengan risiko dan pertimbangan etis.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur tema bidang penelitian tidak terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup institusi, hukum, hak, akuntabilitas, dan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, RQ2 dijawab melalui pemetaan hubungan antarkelompok istilah yang memperlihatkan karakter multidimensi bidang kajian.

3) Perkembangan Tema dan Orientasi Penelitian

RQ3: Bagaimana arah perkembangan serta kesenjangan penelitian mengenai hubungan *AI governance* dan *algorithmic accountability* dalam administrasi publik? Overlay visualization menunjukkan persebaran istilah pada rentang sekitar 2024,4-2025,4. Dalam peta tersebut, *public administration*, *public sector*, *algorithmic accountability*, *human oversight*, *regulation*, *law*, *privacy*, *AI policy*, *auditing*, dan *AI regulation* berada dalam jaringan temporal yang sama, sementara *algorithmic bias*, *machine learning*, *ethical consideration*, *data privacy*, dan *ethics* juga muncul dengan variasi warna temporal. (Laux, 2024)

menempatkan *human oversight* sebagai bagian penting dalam desain tata kelola AI, sedangkan (Nanni et al., 2026) menunjukkan upaya menerjemahkan pertimbangan etika ke dalam instrumen yang dapat digunakan administrasi publik. Hasil overlay memperlihatkan bahwa isu tata kelola, pengawasan, regulasi, audit, privasi, dan etika hadir bersama dalam jaringan kajian yang lebih baru pada dataset. Namun, rentang warna overlay tidak dapat diperlakukan sebagai representasi langsung seluruh perkembangan 2017-2026 karena nilai yang ditampilkan merupakan skala temporal item pada visualisasi.

Dari sisi kesenjangan, beberapa istilah seperti *public value*, *actionable insight*, *global south*, dan *ethical standard* tampak relatif kurang padat atau kurang terhubung dalam density visualization; kondisi ini tidak otomatis membuktikan kekosongan penelitian, tetapi menunjukkan area yang dapat ditelusuri lebih lanjut. Literatur yang tersedia juga menunjukkan perlunya menghubungkan prinsip governance dengan praktik implementasi, kapasitas kelembagaan, konteks yurisdiksi, dan mekanisme akuntabilitas konkret. Dengan demikian, RQ3 dijawab melalui dua temuan, yaitu arah temporal kajian menuju isu *governance* dan *accountability* yang semakin berlapis serta adanya ruang untuk penelitian substantif dan empiris pada tema atau konteks yang relatif kurang terhubung.

4) Pola Kolaborasi Penulis, Organisasi, dan Negara

Jaringan *co-authorship* merupakan temuan pendukung yang memperlihatkan bagaimana produksi pengetahuan dalam bidang ini terhubung pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Pada tingkat penulis, jaringan memperlihatkan beberapa kelompok yang melibatkan Guha, Ahmed, Moon, Eslami, Kumar, Heidari, Kawakami, Dotan, Metcalf, Raj, Steed, Ojewale, serta kelompok Zhang, Ho, Shen, dan Alanoca. Pada tingkat organisasi, jaringan mencakup University of Oxford, The Pennsylvania State University, Tsinghua University, University of South Africa, University of Bristol, Cardiff University, University of Amsterdam, ETH Zurich, University of Brasília, dan beberapa institusi lainnya. Pada tingkat negara, jaringan mencakup United States, China, sejumlah negara Eropa, Asia, Afrika, dan Amerika, termasuk Indonesia. Ukuran node dan garis pada peta menunjukkan bobot serta hubungan jaringan sesuai visualisasi VOSviewer. Pola tersebut memperlihatkan bahwa produksi pengetahuan mengenai *AI governance* dan *algorithmic accountability* berlangsung melalui keterhubungan lintas penulis, organisasi, dan negara.

Temuan ini relevan dengan karakter bidang yang bersifat multidisipliner dan membutuhkan pertukaran pengetahuan lintas konteks. Namun, jaringan kolaborasi tidak digunakan untuk menilai kualitas, produktivitas relatif, atau pengaruh ilmiah suatu aktor. Karena itu, pola *co-authorship* diposisikan sebagai informasi struktural yang melengkapi jawaban tiga RQ utama.

5) Implikasi dan Kontribusi Keilmuan

Temuan penelitian memberikan kontribusi keilmuan dengan menyediakan pemetaan empiris mengenai perkembangan dan struktur pengetahuan *AI governance* serta *algorithmic accountability* dalam administrasi publik. Kontribusi utama terletak pada penggabungan distribusi publikasi, struktur istilah, dinamika temporal, dan jaringan kolaborasi dalam satu korpus 6.088 publikasi. Secara konseptual, hasil pemetaan menunjukkan keterhubungan antara teknologi AI dengan regulasi, *human oversight*, *auditing*, *privacy*, *ethics*, *public trust*, dan administrasi publik. Pola tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas algoritmik dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem *governance* yang melibatkan dimensi teknologi, hukum, organisasi, dan masyarakat. Temuan ini memperluas kajian terdahulu yang menempatkan *human oversight*, transparansi, audit, dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam tata kelola AI.

Secara praktis, peta bibliometrik dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan agenda penelitian dan menelusuri tema yang relatif padat maupun kurang terhubung, tanpa menjadikan kepadatan sebagai ukuran kualitas. Pemetaan kolaborasi juga memberikan informasi mengenai keterhubungan produksi pengetahuan lintas negara dan institusi. Dengan demikian, kontribusi penelitian berada pada pemetaan struktur dan dinamika bidang, bukan pada pengujian efektivitas suatu kebijakan, regulasi, atau model AI tertentu.

6) Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasil. Pertama, dataset berasal dari Dimensions sehingga publikasi yang tidak tercakup dalam basis data tersebut tidak masuk dalam analisis. Kedua, hasil sangat bergantung pada strategi pencarian yang digunakan, sehingga publikasi dengan terminologi berbeda dapat tidak teridentifikasi. Ketiga, metadata bibliografis dan visualisasi VOSviewer terutama menunjukkan frekuensi serta hubungan antaritem dan tidak secara langsung menjelaskan argumentasi substantif setiap artikel. Keempat, ukuran node, kepadatan warna, dan posisi jaringan tidak dapat digunakan sebagai ukuran kualitas metodologis, kualitas jurnal, atau pengaruh ilmiah suatu tema. Kelima, angka publikasi 2026 perlu dipahami berdasarkan cakupan dataset pada saat pengambilan data karena tahun tersebut merupakan tahun berjalan. Keenam, penelitian tidak melakukan pembacaan mendalam terhadap seluruh 6.088 artikel, sehingga hasilnya merupakan pemetaan struktur dan perkembangan pengetahuan, bukan evaluasi kualitas metodologis setiap publikasi. Ketujuh, identifikasi kesenjangan berdasarkan kepadatan atau posisi istilah bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi melalui telaah substantif. Keterbatasan tersebut menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang menggabungkan bibliometrik dengan sintesis literatur dan penelitian empiris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian mengenai *AI governance* dan *algorithmic accountability* dalam administrasi publik mengalami pertumbuhan publikasi yang kuat sepanjang periode 2017-2026, dengan jumlah terbesar dalam dataset tercatat pada 2025 dan 2026. Analisis terhadap 6.088 publikasi memperlihatkan keterhubungan istilah yang mencakup *public administration*, *public sector*, *algorithmic accountability*, *human oversight*, *law*, *regulation*, *auditing*, *privacy*, *ethics*, *algorithmic bias*, dan *public trust*. Network visualization menunjukkan bahwa dimensi administratif, hukum, teknologi, etika, dan kepentingan masyarakat hadir dalam satu struktur pengetahuan. Overlay visualization memperlihatkan distribusi temporal istilah pada rentang sekitar 2024,4-2025,4, sedangkan co-authorship menunjukkan keterhubungan produksi pengetahuan pada tingkat penulis, organisasi, dan negara. Temuan ini menjawab tiga pertanyaan penelitian dengan memetakan perkembangan publikasi, struktur tema, arah temporal, dan area yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Kontribusi penelitian terletak pada penyediaan peta empiris berskala besar, bukan pada penilaian kualitas atau efektivitas kebijakan maupun teknologi tertentu.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis pertama berkontribusi pada konseptualisasi penelitian, perancangan metodologi, pengumpulan dan pengolahan data bibliometrik, analisis, pengembangan kerangka penelitian, interpretasi hasil, serta penyusunan naskah. Penulis kedua berkontribusi pada peninjauan substantif dan

penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir naskah dan bertanggung jawab atas integritas penelitian.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

Dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan teknologi kecerdasan artifisial (AI) sebagai alat bantu dalam penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, dan penyesuaian struktur serta format penulisan. AI tidak digunakan untuk menghasilkan, memanipulasi, atau menganalisis data penelitian. Seluruh isi artikel, interpretasi hasil, serta tanggung jawab atas keakuratan dan integritas naskah tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, R. M., Alayon, S., Torres, J. M., & Martin, C. A. (2026). Data-centric AI governance for responsible organizational value evidence from a European public administration. *AI & SOCIETY*. <https://doi.org/10.1007/s00146-026-02978-y>
- Alegria, J. P. (2023). Anotaciones iniciales para una reflexión ética sobre la regulación de la inteligencia artificial en la Unión Europea. *Revista De Derecho*, 28, e3264. <https://doi.org/10.22235/rd28.3264>
- Anguita, P., Bachmann, I., Elórtégui-Gómez, C., Escobar, M. J. C., Faure, A., Ibarra, P., Lara, J., Padilla, F., & Peña, P. (2023). *Recomendaciones Para Contrarrestar La Desinformacion en Chile. Informe II*. https://doi.org/10.61670/informe-2_2023
- Baruch, A. P., & Sánchez, E. V. (2021). Cuarta revolución industrial: Gobierno Y buena gobernanza. *Revista Latinoamericana De Economía Y Sociedad Digital*, 2. <https://doi.org/10.53857/alf6819>
- Bell, A., Nov, O., & Stoyanovich, J. (2022). *Think About the Stakeholders First! Towards an Algorithmic Transparency Playbook for Regulatory Compliance*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2207.01482>
- Benítez, V. H. G., & Ruvalcaba-Gómez, E. A. (2021). Análisis De las estrategias nacionales de inteligencia artificial en américa latina: estudio de los enfoques de ética y de Derechos Humanos. *Revista De Gestión Pública*, 10(1), 5–32. <https://doi.org/10.22370/rgp.2021.10.1.3151>
- Bravo, Á. A. S. (2020). Marco europeo para una inteligencia artificial basada en las personas. *International Journal of Digital Law*, 1(1), 65–77. <https://doi.org/10.47975/ijdl/1bravo>
- Busuioc, M. (2020). Accountable Artificial Intelligence: Holding algorithms to account. *Public Administration Review*, 81(5), 825–836. <https://doi.org/10.1111/puar.13293>
- Casula, M., & Steinebach, Y. (2025). Implementation Arrangements as Institutions: Assessments and Prospects. *Review of Policy Research*, 42(2), 154–163. <https://doi.org/10.1111/ropr.70004>
- Cernăzanu-Glăvan, C., & Bulzan, A.-Ş. (2025). Explainable AI and fuzzy linguistic interpretation for enhanced transparency in public procurement: Analyzing EU tender awards. *Mathematics*, 13(13),

2215. <https://doi.org/10.3390/math13132215>
- Cevallos-Torres, G., & Vegas-Meléndez, H. (2022). Aportes De La Gobernanza Para Un Nuevo Modelo Post Burocrático. Una Visión Desde La Gestión Pública Local. *593 Digital Publisher Ceit*, 7(5–2), 199–216. <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.5-2.1511>
- Chen, T., Gasco-Hernandez, M., & Gil-Garcia, J. R. (2026). Understanding accountability in ai use within the public sector insights from state governments in the United States. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.70051>
- Cheong, B. C. (2024). Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making. *Frontiers in Human Dynamics*, 6. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1421273>
- Clément, Z. D. d. (2022). Inteligencia Artificial en El Derecho Internacional, Naciones Unidas Y Unión Europea. *Revista Estudios Jurídicos Segunda Época*, 22. <https://doi.org/10.17561/rej.n22.7524>
- Coromina, M. P. (2024). La Inteligencia Artificial: Definición, Regulación Y Riesgos Para Los Derechos Fundamentales. *Estudios De Deusto*, 72(1), 307–337. <https://doi.org/10.18543/ed.3108>
- Cortecchi, M. B., & Bonetti, M. (2024). *Analysis of Artificial Intelligence Applications in Healthcare: A Review of Technologies, Ethical Concerns, and Regulatory Issues*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/beudp>
- Díaz, M. R. O., & Ospina, K. J. Z. (2023). Gobierno digital e inteligencia artificial, una mirada al Caso Colombiano. *Administración & Desarrollo*, 53(1), 1–34. <https://doi.org/10.22431/25005227.vol53n1.2>
- Dubey, A., Yang, Z., & Hattab, G. (2024). A Nested Model for AI Design and Validation. *Iscience*, 27(9), 110603. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2024.110603>
- Fernández, J. V. (2022). La Gobernanza De Los Riesgos Digitales. *Cuadernos De Derecho Transnacional*, 14(1), 489–503. <https://doi.org/10.20318/cdt.2022.6695>
- Ferreira, J. G. (2023). El Impacto de la inteligencia artificial en los trabajadores despedidos por automatización de servicios. *Revista Ces Derecho*, 14(3), 62–81. <https://doi.org/10.21615/cesder.7416>
- Fritz-Morgenthal, S., Hein, B., & Papenbrock, J. (2022). Financial risk management and explainable, trustworthy, responsible AI. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5. <https://doi.org/10.3389/frai.2022.779799>
- García, A. P. (2024). «Gervasio Para Todo» Y La Gobernanza Pública Algorítmica. *Documentación Administrativa*. <https://doi.org/10.24965/da.11401>
- Gil, O. (2024). *Inteligencia Artificial: Gobernanza Y Legitimidad*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/rs7d8>
- Gutiérrez, R. M. (2023). Reforma Para Una Administración De Datos. *Revista Catalana De Dret Públic*, 67, 67–81. <https://doi.org/10.58992/rcdp.i67.2023.4094>
- Harahap, A. A. (2022). *Efektivitas Penggunaan Aplikasi SP4N-LAPOR! Dalam Penanganan Pengaduan di Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kota Pekanbaru*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Harahap, A. A., & Nursyafniati, N. (2026). Implementation and operational challenges of the SP4N-LAPOR digital complaint system: Implementasi dan tantangan operasional sistem pengaduan digital SP4N-LAPOR. *Academia Open*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14872>
- Hernandez, C. S., Ayo, S., & Panagiotakopoulos, D. (2021). *An Explainable Artificial Intelligence (xAI)*

- Framework for Improving Trust in Automated ATM Tools.* 1–10.
<https://doi.org/10.1109/dasc52595.2021.9594341>
- Laux, J. (2024). Institutionalised distrust and human oversight of artificial intelligence: Towards a democratic design of AI governance under the European Union AI Act. *AI & Society*, 39, 2853–2866. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01777-z>
- Martínez, A. C. i. (2020). El dret al servei d'una intel·ligència artificial centrada en l'ésser humà i en Les Institucions. *Idp Revista De Internet Derecho Y Política*, 30. <https://doi.org/10.7238/idp.v0i30.3229>
- MÁVIL, R. H. (2023). El Paradigma de los derechos humanos como base para una regulación de la Inteligencia Artificial global (The Paradigm of human rights as a basis for a global Artificial Intelligence regulation). *Universos Jurídicos*, 21(21), 61–89. <https://doi.org/10.25009/uj.v21i21.2663>
- Merino, B. V. (2023). Dirección Y evaluación de políticas públicas en base a la evidencia: ¿dónde Se Encuentra La Administración General Del Estado? *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas*, 28–44. <https://doi.org/10.24965/gapp.11013>
- Mora-Cantallops, M., García-Barriocanal, E., & Sicilia, M. (2024). Trustworthy AI guidelines in biomedical decision-making applications: A scoping review. *Big Data and Cognitive Computing*, 8(7), 73. <https://doi.org/10.3390/bdcc8070073>
- Moreira-Arteaga, L., & Bermeo-Valencia, M. (2023). Gobernanza inteligente como estrategia de transparencia en la gestión de gobierno abierto. Caso: PORTOVIAL E.P. 593 *Digital Publisher Ceit*, 8(3–1), 306–320. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1864>
- Muñoz, V. (2024). *Inteligencia Artificial: Potenciando El Futuro De América Latina Y El Caribe*. https://doi.org/10.33960/ac_18.2024
- Nanni, R., Bizzaro, P. G., Celepija, A., Usmani, M., & Napolitano, M. (2026). AI ethics canvas a graphical tool to design and deploy ethical artificial intelligence for public administrations. *Data & Policy*. <https://doi.org/10.1017/dap.2026.10088>
- Nannini, L. (2024). Habemus a right to an explanation: So what? – A framework on Transparency-explainability functionality and tensions in the EU AI act. *Proceedings of the Aaai/Acm Conference on Ai Ethics and Society*, 7, 1023–1035. <https://doi.org/10.1609/aies.v7i1.31700>
- Nannini, L., Alonso, J. M., Catalá, A., Lama, M., & Barro, S. (2024). Operationalizing explainable Artificial Intelligence in the European union regulatory ecosystem. *Ieee Intelligent Systems*, 39(4), 37–48. <https://doi.org/10.1109/mis.2024.3383155>
- OECD/CAF. (2024). *Revisión Del Gobierno Digital en América Latina Y El Caribe*. <https://doi.org/10.1787/7a127615-es>
- Percy, C., Dragičević, S., Sarkar, S., & Garcez, A. d. (2021). Accountability in AI: From Principles to Industry-Specific Accreditation. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2110.09232>
- Quinn, H. O., Sedky, M., Francis, J., & Streeton, M. (2024). A Literature Review of Explainable Tabular Data. <https://doi.org/10.20944/preprints202408.0556.v1>
- Quintero-Cuero, G. R. (2023). Optimización de procesos en la gestión pública ecuatoriana. *Mqrinvestigar*, 7(2), 1703–1732. <https://doi.org/10.56048/mqr20225.7.2.2023.1703-1732>
- Rane, J., Kaya, Ö., Mallick, S. K., & Rane, N. L. (2024). enhancing black-box models: Advances in explainable artificial intelligence for ethical decision-making. <https://doi.org/10.70593/978-81->

- 981271-0-5_4
- Ridley, M. (2022). Explainable Artificial Intelligence (XAI). *Information Technology and Libraries*, 41(2). <https://doi.org/10.6017/ital.v41i2.14683>
- Rivera-Ulloa, N., & Vegas-Meléndez, H. (2023). Gerencia pública disruptiva desde la perspectiva de los principios de la Gobernanza Institucional. *593 Digital Publisher Ceit*, 8(3–1), 117–132. <https://doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1838>
- Romero, M. J. (2020). Revisión sistemática del concepto gobernanza cooperativa. *Ciencias Administrativas*, 18, 83. <https://doi.org/10.24215/23143738e083>
- Sáez, F. T., & Jiménez, D. Á. (2021). Transformación Digital de la administración pública: ¿qué competencias necesitan los empleados públicos? *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas*, 49–67. <https://doi.org/10.24965/gapp.i27.10923>
- Salvador, M. (2021). Inteligencia Artificial Y gobernanza de datos en las administraciones públicas: Reflexiones Y evidencias para su desarrollo. *Gestión Y Análisis De Políticas Públicas*, 20–32. <https://doi.org/10.24965/gapp.i26.10855>
- Schoenherr, J. R., Abbas, R., Michael, K., Rivas, P., & Anderson, T. D. (2023). Designing AI using a human-centered approach: Explainability and accuracy toward trustworthiness. *Ieee Transactions on Technology and Society*, 4(1), 9–23. <https://doi.org/10.1109/tts.2023.3257627>
- Sicos, W. M. E., Ruiz, D. D. C., & Pantigoso, F. R. P. (2024). Datos abiertos en gobiernos locales: Una revisión sistemática. *Revista De Climatología*, 24, 212–218. <https://doi.org/10.59427/rcli/2024/v24cs.212-218>
- Ulnicane, I., & Erkkilä, T. (2023). Politics and policy of Artificial Intelligence. *Review of Policy Research*, 40(5), 612–625. <https://doi.org/10.1111/ropr.12574>
- Urquhart, L., McGarry, G., & Crabtree, A. (2022). *Nordic Human-Computer Interaction Conference*. <https://doi.org/10.1145/3546155>
- Vallé, H. A. C. (2021). Construyendo un estado cognitivo en la cuarta revolución industrial. *Ejes De Economía Y Sociedad*, 5(9), 141–185. <https://doi.org/10.33255/25914669/596>
- Wang, C., Yin, Y., & Hu, H. (2026). The rise of algorithmic governance and the dual revolution Applications, challenges, and governance of artificial intelligence in public administration. *Technology in Society*. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2026.103264>